



**News Title :** Nilai Transaksi Kripto Indonesia Tembus Rp 211 Triliun, Lampau 2023

**Media Name :** Liputan6.com

**Journalist :** Gagas Yoga Pratomo

**Publish Date :** 31 May 2024

**Tonality :** Positive

**News Page :** 1

**News Value :** 2,250,000

**Resources :** Yudhono Rawis (CEO Tokocrypto), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))

**Ads Value :** 750,000

**Section/Rubrication :** Crypto

**Topic :** Transaksi Kripto

## Nilai Transaksi Kripto Indonesia Tembus Rp 211 Triliun, Lampau 2023

Jumlah investor kripto di Indonesia juga meningkat pesat, kini telah mencapai 20,16 juta orang



Nilai transaksi kripto di Indonesia menunjukkan lonjakan signifikan pada awal 2024. (Foto: Unplash/Raphaël Wilo)

Liputan6.com, Jakarta - Nilai transaksi kripto di Indonesia menunjukkan lonjakan signifikan pada awal 2024. Berdasarkan data terbaru Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), nilai transaksi kripto dari Januari hingga April 2024 telah mencapai Rp 211 triliun.

Angka tersebut sudah melampaui total nilai transaksi sepanjang 2023 yang tercatat sebesar Rp 149,25 triliun. Bahkan, bila dibandingkan dengan nilai transaksi kripto pada periode yang sama pada 2022 yang mencapai Rp 306,4 triliun, pertumbuhan ini menunjukkan tren yang sangat positif dan mengindikasikan potensi besar untuk sisa 2024.

### BACA JUGA: Elon Musk Bahas Kripto dengan Donald Trump?

Jumlah investor kripto di Indonesia juga meningkat pesat, kini telah mencapai 20,16 juta orang. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan minat yang tinggi dari masyarakat, tetapi juga mencerminkan kepercayaan yang semakin kuat terhadap aset digital di tengah pasar yang terus berkembang.

Laporan Chainalysis bertajuk "Cryptocurrency Gains by Country 2023," menempatkan Indonesia pada peringkat kelima secara global dalam hal keuntungan kripto, dengan total keuntungan mencapai Rp 16,7 triliun pada tahun 2023.

Ini adalah pencapaian yang mengesankan, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Mengomentari hal ini, CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis, mengatakan jika tren ini terus berlanjut, ia memprediksi pasar kripto di Indonesia bisa mencapai nilai transaksi antara Rp 700 triliun hingga Rp 800 triliun pada akhir 2024.

Estimasi ini berdasarkan pada pertumbuhan nilai transaksi yang sudah terlihat hingga April 2024 dan ekspektasi keuntungan yang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diperkirakan mencapai sekitar Rp 23,81 triliun.

"Prospek pasar kripto pada 2024 terlihat cukup optimis. Prediksi pertumbuhan pasar kripto Indonesia mungkin akan mengalami kenaikan yang bisa lebih atau menyamai nilai transaksi dengan yang pernah ditunjukkan pada 2021. Estimasi total nilai transaksi kripto diperkirakan bisa mencapai Rp 700-800 triliun," kata Yudho dalam siaran pers, dikutip Jumat (31/5/2024).

\* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

## Perubahan Perilaku Investor Indonesia



Keuangan Kripto (Foto: Kanchanani/Unplash)

Yudho menuturkan, ada perubahan perilaku investor kripto di Indonesia pada tahun 2023 dibandingkan dengan 2024. Pada 2023, menurutnya investor lebih cenderung memperhatikan aset mereka daripada mengonversinya ke uang fiat, didorong oleh ekspektasi kenaikan harga yang belum mencapai puncak tertinggi sepanjang masa.

Sementara di awal 2024 ini, investor semakin aktif dalam melakukan transaksi, baik dalam membeli maupun menjual aset kripto. Ini menunjukkan kepercayaan yang meningkat terhadap stabilitas dan potensi keuntungan jangka pendek di pasar kripto.

"Investor kripto di Indonesia mulai menunjukkan pola investasi yang lebih dinamis pada tahun 2024," ujar Yudho yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakindo-ABI).

### Adopsi dan Regulasi Makin Matang

Yudho menambahkan, tren positif ini juga didukung oleh beberapa perkembangan penting di pasar global.

Persetujuan ETF Bitcoin dan ETF Ethereum spot di Amerika Serikat serta perdagangan BTC dan ETH ETP (exchange-traded products) di Bursa Efek London menandai langkah signifikan dalam adopsi aset kripto oleh institusi keuangan tradisional.

Perubahan sikap regulator global, seperti Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris yang kini lebih terbuka, berpotensi mendorong lahirnya regulasi yang lebih ramah terhadap aset kripto di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia.

"Dengan semakin banyaknya produk keuangan yang tersedia, seperti ETF dan ETP yang diperdagangkan di bursa internasional, serta regulasi yang lebih mendukung, investor merasa lebih percaya diri untuk melakukan transaksi," pungkasnya.

Ini mendorong likuiditas pasar dan menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan nilai transaksi kripto di Indonesia.

## Investor Kripto Indonesia Terbesar Ketujuh di Dunia



Ilustrasi aset kripto Bitcoin. (Foto By AI)

Sebelumnya, jumlah investor aset kripto di Indonesia terus bertambah setiap bulan. Bahkan saat ini jumlah investor kripto Indonesia menduduki peringkat terbesar ketujuh di dunia. Capaian ini berdasarkan data yang terkumpul hingga Maret 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 19,75 juta investor per Maret 2024. Jumlah ini meningkat 570.000 investor jika dibandingkan data pada Februari 2024.

"Indonesia berada di peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia," kata Hasan saat Rapat Dewan Komisiner (RDK) di Jakarta, Senin, 13 Mei 2024.

Adapun, nilai transaksi aset kripto pada periode Maret 2024 tercatat sebesar Rp103,58 triliun. Nilai transaksi ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp33,69 triliun.

"Jumlah investor dan transaksi aset kripto domestik dalam tren meningkat," ujarnya.

Dengan demikian, total akumulasi nilai transaksi aset kripto senilai Rp158,84 triliun sampai dengan Maret 2024.

### Literasi dan Inklusi

Ke depan, OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital, termasuk aset kripto. Ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).

Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 ini merupakan penyempurnaan terhadap mekanisme Regulatory Sandbox, yang merupakan fasilitas OJK untuk menguji dan mengembangkan teknologi keuangan yang inovatif.

Peraturan ini menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pengaturan dan pengawasan terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan.

"OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital, penguatan ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan, serta praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, khususnya terkait dengan penerapan Artificial Intelligence di sektor ITSK," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

### BACA JUGA:

[ETF Bitcoin BlackRock Dominasi Pasar, Aset Nyaris Rp 325,3 Triliun](#)

4 dari 4 halaman

## Nilai Pajak Aset Kripto di Indonesia Sentuh Rp 112,93 Miliar pada Kuartal I 2024



Koin Kripto atau Crypto. Disimak harga kripto hari ini.

Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkapkan nilai pajak aset kripto di Indonesia pada kuartal I 2024 mencapai Rp 112,93 miliar.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya menjelaskan, nilai pajak kripto ini tidak jauh berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Namun menurutnya, meningkatnya nilai transaksi aset kripto pada 2024, akan mendorong penerimaan pada negara dari pajak kripto semakin besar.

"Pada 2022 saja pajak kripto berkontribusi sekitar 50 persen dari total pajak fintech," kata Tirta dalam Panel diskusi Investasi Aman di Era Digital: Strategi dan Regulasi Aset Kripto di Jakarta, dikutip Kamis (23/5/2024).

Evaluasi Pajak Kripto Terkait besaran pajak yang sempat dikeluhkan para pelaku industri, Tirta menjelaskan saat ini evaluasi pajak kripto masih dilakukan yang tak hanya sekedar besaran pajak aset kripto.

Menurut Tirta, pajak kripto perlu dievaluasi karena banyak yang trading kripto di platform luar sehingga menyebabkan terjadinya *capital outflow* dan nilai transaksi di tanah air berkurang.

"Pajak yang dikenakan untuk exchange luar belum bisa diselesaikan oleh DJP, maka tidak ada equal treatment. Jadi pengenaan pajak untuk yang trading ke luar negeri bisa di evaluasi," jelas Tirta.

Dari sisi pelaku industri, CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis senada dengan Tirta yang menyebut perlu adanya equal treatment bagi untuk exchange luar dan dalam sehingga nilai transaksi di dalam bisa lebih besar.

"Harapannya pajak aset kripto yang terdiri dari PPh dan PPh, mungkin PPh bisa ditinjau kembali. Selain itu, harapannya ada skema kreatif terkait pajak aset kripto di tanah air," jelas Yudhono.